



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN LUMBIR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WARDOYO, S.IP

Jabatan : CAMAT LUMBIR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO, M.M.

Jabatan : BUPATI BANYUMAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumbir, 12 September 2025

Pihak kedua

BUPATI BANYUMAS

  
  
SADEWO TRI LASTIONO

Pihak Pertama

CAMAT LUMBIR

  
  
WARDOYO, S.IP

NIP. 197011221990031002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN LUMBIR  
Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177  
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : lumbir@banyumaskab.go.id  
Website : www.lumbirkec.banyumaskab.go.id  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN LUMBIR

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	<b>Formulasi</b> : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas <b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif <b>Sumber Data</b> = Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	100%	<b>Formulasi</b> untuk kecamatan tanpa kelurahan dan kecamatan dengan desa dan kelurahan: (20% X realisasi program pengawasan desa)+ (20% X realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik) + (20% X realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20% X realisasi program trantibum)+(20% X realisasi program pemerintahan Umum  formulasi untuk kecamatan dengan kelurahan pengali nya adalah 25%.  <b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif <b>Sumber data</b> : Laporan hasil pelayanan
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	89,39	<b>Formulasi</b> = Nilai SAKIP Kecamatan <b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif <b>Sumber Data</b> = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
4	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SPIP Kecamatan	3,287	<b>Formulasi</b> = Nilai SPIP Kecamatan <b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif <b>Sumber Data</b> = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	<b>Formulasi</b> = (APBDes tepat waktu dibagi Total APBDes) dikali 100% <b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif <b>Sumber Data</b> = Data desa yang penetapan APBDesnya tepat waktu
6	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan pelayanan Publik yang terselesaikan Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	<b>Formulasi</b> = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat <b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif <b>Sumber Data</b> = Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat



7	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umu	100%	<b>Formulasi</b> = (Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani dibagi Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi) dikali 100% <b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif <b>Sumber Data</b> = Laporan penanganan gangguan trantibumlinmas
8	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100%	<b>Formulasi</b> = Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan <b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif <b>Sumber Data</b> = Laporan hasil pemberdayaan masyarakat <b>Keterangan</b> = Yang dimaksud kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pada lembaga kemasyarakatan urusan Permas, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan keagamaan.
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentasi fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	<b>Formulasi</b> = Persentase penyelesaian pekerjaan atas inisiasi pekerjaan yang ada (Urusan penugasan yang dilaksanakan dibagi urusan penugasan yang direncanakan dikali 100) <b>Type Perhitungan</b> = Progres Positif <b>Sumber Data</b> = Laporan pelaksanaan urusan yang ditugaskan

No	PROGRAM	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.386.091.467,00	APBD/DAU
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.475.000,00	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88.465.000,00	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.845.000,00	APBD
5	PROGRAM PEYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.490.000,00	APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.700.000,00	APBD
Jumlah Anggaran		Rp 2.495.066.467	

